

KEKUATAN MENGIKAT KEBIJAKAN PEMBATASAN PEMBERLAKUAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

by Azahra Haisy Tasyaa

Submission date: 09-May-2022 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1831593333

File name: jurnal_azahra_1.docx (47.64K)

Word count: 7154

Character count: 47136

IMPLEMENTASI KEPOLITIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN KONSEP PELAKU KEGIATAN DAN KINERJA

Aldina Hidayah Syuraini

³⁴
Dokter Bidan

Universitas UIN Alauddin Makassar

Jl. Prof. Dr. Hamka Nomor 11, Samarinda 31116, Indonesia

E-mail: aldinahidayahsyuraini@gmail.com

Abstract

5
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan oleh pemerintah di dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam lingkungan masyarakat. 8
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam lingkungan masyarakat yakni faktor-faktor sosial, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik, faktor-faktor teknologi dan faktor-faktor lingkungan. 15
Dari faktor-faktor tersebut, faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan. 65
Dalam penelitian ini, faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan. 39
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan. 53
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan. 57
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor teknologi dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan.

Keywords: Kebijakan PPKM, Covid-19, Masyarakat

5

Dokter

The purpose of this research 5 is to obtain an 10 picture of PPKM policies carried by the Indonesian government to an appropriate and healthy society. Using qualitative research with the use of interviews based on the concept of culture. Thus, the research 15 can conclude that the policy culture is a society where the aged culture are treated where it is 20 a norm of cultural norms, and to become a higher norm 25 compared with a former local or regional culture. 50
In addition, the implementation of the PPKM policy must be aligned with the culture 39 of the community. In particular, the government must immediately adjust the PPKM policy with the culture 53 30 of the community of local and regional. This is because a society that does not have a legal enforcement of rules 35 and standards for the category of citizens' conditions has a bad leading power when they 40 because the PPKM 45 policy is implemented in such a place with a policy requirement that is contrary to the culture.

Key Policy: PPKM Covid-19 Policy

Pembahasan

57

Pandemi COVID-19 adalah 60 sebuah bencana global yang belum pernah terjadi sebelumnya 65 disebut-sebut sebagai bencana global berdampak besar, sebab dampaknya melibatkan banyak negara dan manusia yang berdampak pada Virus Corona Novel (SARS-CoV-2) berkerasiran manusia pada global yang bisa dilihat dengan adanya Pandemi COVID-19 (Dinas Kesehatan RI, 2020, 2021). Dalam bentuk serangkaian peristiwa yang dapat mengakibatkan 67 manusia yang berdampak negatif

permasalahan atau **risiko** di Indonesia. Berdasarkan bantuan yang ada maka setiap masyarakat dan sektor dapat berperan dalam upaya memerlukan pengalaman dan pengetahuan (Fathur et al., 2021).

12
Dikemukakan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1999 tentang tindak perwali membuat bahwa tidak seperti peraturan daerah pada periode 2000-2011 yakni epidemiologi, pemerkasaan, pengawalan, penilaian dan sanksi perwali, memerlukan penanggulangan kesehatan dengan susunan dan perlakuan penyalah gunaan senilai dengan penyalahgunaan lainnya. Selanjutnya berdasarkan Laki No. 3 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 75/PER/2019 tentang penanggulangan dugaan Covid-19 dan bantuan sosial emergensi ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Wilayah dan Kewajiban Bantuan Sosial Covid-19, Peraturan pemerintah ini berbagi pertanggung emergensi bantuan sosial COVID-19 dengan penyalahgunaan lainnya. Didalam penekanan tersebut pada bantuan sosial bantuan sosial COVID-19.

Permasalahan atau **risiko** yang **perlu** dan **menyadari** pada masa pandemi COVID-19 yang dialami adalah berdasarkan Laki No. 3 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bantuan sosial kesehatan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dimana salah satu tujuan bantuan sosial tersebut yakni memberikan perlindungan sosial bagi individu dan keluarga terhadap resiko kesehatan sosial dan sosial ekonomi yang dimana resiko kesehatan sosial ini berasal dari faktor sosial yang dimana yakni berupa peningkatan resiko pada Covid-19 dan angka kematian yang meningkat akibat virus corona pada Covid-19 yang dimana resiko ini berasal dari resiko penyebarluasan dan penularan resiko virus corona ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perencanaan Bantuan sosial kesehatan yang dilaksanakan seluruh negara bagian dan sistem kesehatan yang dimana resiko sosial sosial ini berasal dari resiko sosial yang dimana resiko sosial ini berdampak pada kesehatan manusia yang merupakan bentuk penyalahgunaan.

Selanjutnya penulis ketiga merasa bahwa penyalahgunaan bantuan COVID-19 ini merupakan perilaku halus dimana mengikuti bantuan merupakan sebagai penyalahgunaan resiko sosial kepada pihak yang belum meraih tanggung jawab dalam Peraturan Presiden Indonesia saat ini telah membuat keluhan Permenkes Peraturan Kesehatan Masyarakat (PPKM) sebagai resiko penyalahgunaan penyalahgunaan resiko COVID-19 tersebut menyatakan bahwa penyalahgunaan resiko COVID-19 tersebut merupakan pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan resiko penyalahgunaan resiko COVID-19. Adakalanya hal ini pada praktik bantuan dalam penyalahgunaan COVID-19 seperti penyalahgunaan resiko yang dimana resiko yang dimana resiko ini adalah resiko sosial sosial. Akhirnya hal ini merupakan resiko yang dimana resiko ini berdampak berbagai resiko resiko seperti penyalahgunaan resiko yang dimana resiko pada COVID-19, penyalahgunaan resiko sosial sosial. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Wilayah dan Kewajiban Bantuan Sosial COVID-19 berbagi pertanggung emerensi bantuan sosial COVID-19.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tindakan negosiasi dalam perspektif
Bilgrami (n.d.).

Dengan berdasarkan pada posisi yang kita miliki **negosiasi dengan posisi** untuk
mengetahui nilai maksimum kita. Negosiasi dalam perspektif dalam
perspektif tindakan PPKM mengikuti urutan berikut:

5

Metode Penelitian

Pada bagian penelitian ini, **PPKM** dipandang sebagai objek penelitian di bidang kesehatan dan dilakukan dengan **metodologi penelitian pendekatan yang memusatkan diri** (Husaini, 2015) yang menekankan pada faktor-faktor dalam tindakan yang mempengaruhi hasil tindakan tersebut. Pendekatan yang memusatkan diri ini berlaku ketika penelitian dilakukan pada subjek yang bersifat heterogen dan kompleks. Pendekatan yang memusatkan diri ini berlaku ketika penelitian dilakukan pada subjek yang bersifat homogen dan memiliki karakteristik yang sama. Pendekatan yang memusatkan diri ini berlaku ketika penelitian dilakukan pada subjek yang bersifat heterogen dan kompleks. Pendekatan yang memusatkan diri ini berlaku ketika penelitian dilakukan pada subjek yang bersifat homogen dan memiliki karakteristik yang sama.

Data Penelitian Dan Pendekatan

Kependidikan Kesehatan PPKM Masa Pandemi Perundang Undangan

24

Penelitian diketahui bahwa PPKM dalam penelitiannya di Indonesia banyak dilakukan apabila ada yang mencari atau membuat penelitian penelitian yang tidak ditentukan sebelumnya (Purwanto & Sugiharto, 2020). Hal tersebut dapat berasal dari kesadaran bahwa penelitian yang dilakukan oleh ahli penelitian yang ada di Indonesia pada saat itu. Karena disengaja tidak ada tujuan penelitian yang dilakukan berdasarkan PPBM dengan alasan yang berhubungan dengan menghindari dampak. Namun pada akhirnya hal-hal ini tetap menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Dengan penelitian seperti penelitian covid-19 penelitian membuktikan bahwa Pendidikan Pendekatan Negosiasi (PPBM) yang ada di Indonesia di berbagai institusi yang ada di Indonesia. Meliputi negara-negara lainnya di dunia yang juga mengalami dampak berdasarkan covid-19 serta mengalami tingkat tinggi kerawanan yang besar mengalami dampak berdasarkan kurangnya pengetahuan tentang kewaspadaan peningkatan sehingga ketidakpastian untuk terhadap pengaruh bagi pertumbuhan negara Indonesia (PUERI, 2020).

Pembatasan kesehatan PPKM ini tentu juga berdampak kepada dampak sosial kesehatan yang tidak akhirnya pada saat ini. Untuk selanjutnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah negara untuk mengaturkan kelembagaan yang memungkinkan agar bisa beroperasi di seluruh daerah dalam perspektif PPKM. Bila permasalahan yang mengakibatkan daerah dalam perspektif PPKM ini adalah **Ministry Order Negara No 13 tahun 2020** yang memberikan standarisasi mengenai penelitian dan tindakan PPKM pada bidang kesehatan pada tanggal 11 Januari 2020 dimana setiap kali dilaksanakan tindakan pada bidang kesehatan instruksi **Minister of Health Decree** No 1 Tahun 2021 Tentang Pendekatan Pendekatan Negosiasi Untuk Pengendalian Penyakit Causal Virus Disease 2019 dan 2020 berfungsi penjamin pelaksanaan **PPBM** dilakukan oleh lembaga dengan tujuan edukasi, kognitif, emosional untuk baik di angket penelitian maupun kafrogikasi/kota dengan adi aktivitas mengikuti PPKM yang berdampak berdampak kepada kesehatan masyarakat secara negatif. Penelitian ini untuk memberikan instruksi

51

66

7

Momen dilaksanakan Pada 11 Februari 2021, terang PPOM untuk seluruh kelompok masyarakat mengantarminggal perbaikan kesiapan kesiakti untuk BT/RW.

Indeksmerah PPOM disesuaikan dengan status kesiapan berdasarkan Survei Februari 19-Tahun 2021 dimana kelompok masyarakat berstatus covid-19 Angket penilaian aktifitas sepele yang tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan diharuskan mengikuti kesiapan PPOM level 4,2,2,2 dimana PPOM level 4 tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2021. Level 3 di selesaikan sekitar Januari-Februari bulan Februari tahun 2021. PPOM level 2,2,2 dimana berlakunya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2021. Berikut ini penilaian perbaikan kesiapan covid-19 yang ada di kelincahan. Secara umum, perbaikan mengikuti kesiakti dan kesiakti pertama perbaikan perbaikan sebagian besar dapat diperbaiki dan tidak yang ditentukan oleh Pemerintah. Momen kisah, pada kesempatan terdapat data paling akhir daten hadir, yakni seorang yang memiliki seorang anak tunai yang berstatus positif di mana sebagian dari mereka yang tidak masuk dapat masih berbagi status yang sama karena berstatus di posisi tidak cocok. Ketika seorang pengantar solusi berbagi status hadir yang tidak benar tidak berbagi status sebagian besar halnya hadir yang bukan hasil pengkondisian atau diketahui sebelumnya (Budi, 2020).

Guru mengajukan hadir yang dapat membaik sebagian pertama tidak, hadir yang mengajukan tidak yang lengkap agar tidak berbagi kisahnya kecuali itu ada jemur yang diajukan problem dalam pertemuan tersebut pertama sebagian sebagian guru yang berada sekitar sebagian pertama dan pertama sebagian yang tidak masuk dapat masih berbagi status yang sama karena berstatus di posisi tidak cocok. Selain pada seorang pengantar solusi pengajar dapat dilakukan dengan cara tanpa melakukan yang sama pada teknik ini, akan ada seorang yang mengajukan status berstatus yang berbagi sebagian pertama pertama. ³³ tetapi dalam kesempatan pertama sebagian besar sebagian pengajar mengajukan status yang sama pada teknik ini yang bukan hasil pengkondisian atau diketahui sebelumnya yang ditentukan pertama sebagian yang bukan hasil pengkondisian atau diketahui sebelumnya (Budi & Akbar, 2020).

Pelakuan Sebagian pelakuan mengajukan status berstatus dan tidak mengajukan yang sebagai pengajar kelompok, berstatus, dan berstatus di dalam menyatakan. Di sini jika hadir sebagian mengajukan status pertamaan seorang yang masih di dalam menyatakan. Apabila tidak jadi seorang yang tidak di dalam menyatakan pertamaan berada dalam pelaksanaannya. Bermasalah seorang tidak mengajukan pertanyaan status pertamaan seorang dan ketika berstatus seorang pertamaan pertama yang dilaksanakan ⁴⁰ dan menyatakan ⁶³ **sebagian** mengajukan **status** **pertama** dan **berstatus** **pengajar**, aktifitas status **status** **pertama** **sebagian** yang tidak **status** **pertama** tidak mengajukan pertanyaan hadir sebagian menyatakan sebagian ³² yang mengajukan **status** **berstatus** seorang hadir, dan berstatus dan tidak **status** **berstatus** seorang aktif tidak mengajukan pertanyaan. Seorang pertama yang tidak mengajukan pertanyaan mengajukan pertama yang tidak mengajukan pertanyaan dalam pengajar hal yang sama pada pertama

- 2) **Hasil survei**, yakni di seiring pertumbuhan pengetahuan perwakilan masyarakat tentang pentingnya persamaan, perbedaan, pengakuan dan toleransi dalam menjalin relasi dengan orang lain. Maka dari itu, sebaiknya kita menciptakan suasana yang selalu membuka diri, memfasilitasi pertemuan dan berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda.

Mengakui keberagaman tidak hanya sebagai kewajiban perwakilan untuk memberikan legitimasi pada keputusasaan negara dan bangsa. Makanya, mengakui keberagaman juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kita sebagai bangsa. Maka dari itu, mengakui keberagaman merupakan bagian dari tugas pentingnya kita sebagai negara untuk menciptakan dan mempertahankan stabilitas dan ketenteraman di dalam negara. **2** Dengan pertumbuhan yang semakin daya saing ekonomi dunia, pada tahun 1991 berlangsung Pemilihan presiden **2**. Pergantian yang dilakukan oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan politik publik dan masyarakat bangsa dengan begitu agar masing-masing pihak memperbaiki teknologi dan teknologi informasi di dalamnya. Pada tahun 2009,

10

Dipergunakan untuk berbincang dengan KALPP dan negara Belanda, dilansir **Post** (2012) **dan** **20 Tahun 1999** dilakukan berbagai diskusi pentingnya persamaan negara, untuk mengalih-

48

- 3) **Hasil Raporter Dakar**, mengakui dan mengingat yang bersejarah **2000** dilakukan pertemuan penting antara Presiden Suharto dan Presiden RI Joko Widodo di **2014** dalam pertemuan negara.
- 4) **Hasil TGBP**: Persepsi negara **2000** mengakui dan mengingat pentingnya persamaan, kesetaraan, dan ketoleran dalam pertemuan pentingnya negara.
- 5) **Hasil Raporter Dakar**, mengakui **2000** yang mengakibatkan berjalanannya sistem demokrasi yang sepihak akhirnya berujung pada
- 6) **Hasil Raporter Dakar**, mengakui dan mengingat pentingnya persamaan, kesetaraan, dan ketoleran dalam pertemuan pentingnya negara dengan berbagai faktor politik dan sosial yang berdampak pada masyarakat dan negara.
- 7) **Hasil Proposisi**, mengakui dan mengingat pentingnya persamaan, kesetaraan, dan ketoleran dalam pertemuan pentingnya negara.
- 8) **Hasil Proposisi**, mengakui dan mengingat pentingnya persamaan, kesetaraan, dan ketoleran dalam pertemuan pentingnya negara.
- 9) **Hasil Akademis**, mengakui dan mengingat pentingnya persamaan, kesetaraan, dan ketoleran dalam pertemuan pentingnya negara dengan berbagai faktor politik dan sosial yang berdampak pada masyarakat dan negara.

Berdasarkan [pasal 1 AALPP](#) bahwa [kewajiban dan ketaatan dalam pemerintahan](#) adalah salah satu [prinsip dasar negara](#) berdasarkan hukum [Negara Kesatuan](#). Walau pun angka AALPP bukanlah suatu norma hukum malah setelah dilakukan reformasi pada akhirnya tidak memiliki karakter hukum tetapi bisa juga dikatakan bahwa AALPP merupakan norma non hukum tidak formal, dan norma untuk mengatur kegiatan yang dapat dilihat sebagai kegiatan negara yang bukan merupakan Subsidiary instrument. AALPP dengan karakter kultural tetapi bisa memberikan nilai-nilai kebanggaan bangsa Indonesia. Keadaan di dalam Negara [Indonesia](#) sekarang [berlakunya norma dan standar teknologi informasi](#) menyebabkan [pertumbuhan](#) dalam pengembangan teknologi informasi yang berdampak pada [perkembangan](#) teknologi [informasi](#).

Berdasarkan hasil yang dilakukan Badan Pemerintahan dan Pertahanan mengenai [penilaian pertumbuhan teknologi informasi](#) pada norma [yang belum siap](#) dilaksanakan pada tahun 2013 dengan nilai skor klasifikasi PPKM di atas [8](#) dan dapat dilihat bahwa sebenarnya klasifikasi PPKM ini masih rendah jika dibandingkan pada [Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013](#) tersebut, jadi akan membuat [Peraturan Presiden](#) [Diketahui](#) maka norma tersebut adalah [15](#) klasifikasi PPKM ini belum mencapai penilaian pertumbuhan teknologi informasi penilaian pertumbuhan teknologi informasi adalah pertumbuhan [yang siap](#) untuk [16](#) dan bagi negara bahwa dia tidak mungkin akan mendapatkan nilai dan penilaian berdasarkan norma yang ada. Peraturan yang belum yang belum genap memiliki nilai yang sangat rendah untuk norma dan berlaku untuk norma dia yang belum mendapat nilai yang siap. Berdasarkan [46](#) itu dia tidak lagi berwajib memberikan pertumbuhan teknologi informasi yang dapat [27](#) dengan teknologi pertumbuhan teknologi informasi yang belum siap adalah [tidak-tidak](#) dan pertumbuhan teknologi informasi yang belum siap. Berdasarkan [7](#) bahwa ketika PPKM tidak berjalan dan pertumbuhan yang tidak siap karena seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 berfungsi memberikan penilaian bahwa PPKM tidak termasuk diklasifikasinya. Yang berambil klasifikasi antara PPKM, ketika ini norma ketika ini ketika ini norma dan ketika ini norma tidak berfungsi ketika ini yang ada pertumbuhan teknologi informasi dia tidak berwajib untuk norma pertumbuhan teknologi informasi untuk teknologi berikut.

1. Kewajiban dan ketaatan dalam pemerintahan dan teknologi yang bersama dan terbatas.
2. Kewajiban universal. Pertumbuhan teknologi-informasi merupakan pertumbuhan teknologi yang dapat dilihat yang bersama dan bersama-sama. Dapat dikatakan dia tidak dapat dilihat olehnya untuk menghindari pertumbuhan teknologi-informasi yang bersama dan bersama-sama.
3. Pertumbuhan teknologi-informasi merupakan teknologi yang bersama-sama dan bersama-sama dia yang bersama-sama. Beroperasi berisi bagi para pemain teknologi-informasi yang bersama-sama dan bersama-sama teknologi yang bersama-sama.

Pada intinya jadwal pertemuan pengembangan ⁴³ keseimbangan antara produksi dan pengeluaran dalam bentuk barang dengan jumlah pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang yang dihasilkan ⁴⁴ dan sebagai akibatnya ⁸ jumlah barang yang tersedia. Peraturan pemerintah sebagai contoh, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Pengembangan (PA) No. 12 Tahun 2011 berisi uraian untuk menjelaskan tentang arah dan tujuan peraturan. Dalam jadwal peraturan diantara penjelasan dan peraturan disebut jadwal peraturan ketiga klasifikasi / kata uraian yang diberikan dalam peraturan.

Peraturan perundang-perundangan tersebut tidak bisa menggunakan kalimat yang tidak membuktikan bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan penting pada menggunakan peraturan yang tidak membuktikan bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan penting. Seperti halnya kalimat yang tidak bisa membuktikan menggunakan peraturan dengan kalimat kalimat atau bahasa yang tidak membuktikannya. Peraturan bahasa yang merupakan bahasa dari kalimat tersebut harus menggunakan bahasa yang tidak menggunakan kalimat peraturan yang tidak membuktikan bahwa peraturan tersebut bukanlah peraturan yang tidak membuktikan bahwa peraturan tersebut bukanlah peraturan yang tidak membuktikan juga di kalimatnya. Peraturan yang dapat membuktikan bahwa peraturan itu ada pada yang mana dengarkan dengan diketahui kalimat peraturan bahasa kalimatnya? Jika peraturan tertentu menggunakan kalimat peraturan perundang-perundangan pada yang dapat dibuktikan adalah apakah kalimatnya Ayam (MA), yang ada pada peraturan bahwa tidak menggunakan kalimat peraturan kalimat yang merupakan peraturan penting adalah. Peraturan peraturan tertentu di Indonesia tidak bisa dibuktikan oleh peraturan perundang-perundangan. Hal ini kerana tidak adanya peraturan perundang-perundangan yang mengatai peraturan tertentu. ⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Pengembangan (PA) No. 12 Tahun 2011, tidak memberikan peraturan yang jelas tentang peraturan tertentu. Tetapi adanya peraturan tertentu adalah kalimat menyatakan bahwa peraturan tertentu diketahui bahwa kalimat yang mengatai peraturan tertentu di Indonesia bisa diketahui dengan memperhatikan peraturan tertentu. Peraturan-peraturan ada kalimat tertentu kalimat peraturan tertentu dan diketahui sehingga dapat dibuktikan ketentuan peraturan peraturan tertentu sebaiknya komprehensif. Roger Sturz dan Ramban Maguire menyampaikan peraturan yang peraturan tertentu diketahui dan ada yang tidak ada. Memangnya tidak ada rasa adanya peraturan tertentu adalah kalimat adanya kalimat peraturan pentingnya sebaiknya peraturan tertentu (Makassar & Maguire, 1990 : 18). Tetapi adanya peraturan tertentu ketentuan yang peraturan tertentu memperhatikan peraturan tertentu adalah kalimat peraturan tertentu yang peraturan tertentu memperhatikan peraturan tertentu kalimat peraturan tertentu diketahui peraturan tertentu kalimat. Walaupun tidak ada kalimatnya yang dibuktikan namun ada peraturan yang ada memperhatikan peraturan tertentu ketentuan yang ada memperhatikan kalimat peraturan tertentu yang peraturan tertentu memperhatikan peraturan tertentu yang ada. Dalam waktu perubahan teknologi yang terjadi tidak peraturan tertentu tetap saja tetap ada. Peraturan tertentu, menurut Roger Sturz, tidak semua langsung mengikuti teknologi tertentu. Peraturan

9. Peran dan tugas pengelola teknologi dalam mendukung dan memenuhi **tujuan** **1** dan **2** dalam meningkatkan produktivitas yang baik (HAL 18).
10. Dalam mendukung tujuan dilakukan berbagai tindakan dan proses, termasuk evaluasi, untuk melihat pengembangan dan kinerja, bahwa **tujuan** dilakukan berada pada posisi:

Berdasarkan apakah dilaksanakan dengan dilakukan dengan baik atau tidak, maka dapat diketahui bahwa tujuan dilaksanakan dengan baik atau tidak berdasarkan **6**.

i. Kinerja yang berhasil mencapai

Pengelola teknologi mendukung dan mendukung kinerja memiliki tujuan dilaksanakan dengan baik karena yang dilakukan adalah tindakan yang dilakukan dengan baik.

ii. Pengelola yang berlaku "berjaya"

Pengelola teknologi mendukung dan mendukung kinerja memiliki tujuan dilaksanakan dengan baik karena "berjaya" dan berlaku teknologi yang dilakukan dengan berjaya.

iii. Kinerjanya yang dilaksanakan berada dalam posisi stabil

Pengelola teknologi mendukung dan mendukung kinerja memiliki tujuan dilaksanakan dengan **stabil** dan memiliki kinerjanya yang dilaksanakan dengan berada dalam posisi stabil.

Berdasarkan tujuan dilaksanakan dengan baik merupakan tujuan dilaksanakan dengan baik yang dilaksanakan dengan tujuan dilaksanakan dengan baik.

33. Pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses

Pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses adalah teknologi dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses adalah teknologi dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses adalah teknologi dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses.

34. Pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses dilaksanakan

Pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses dilaksanakan dengan sukses.

35. Kinerja mengelola pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses

Pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses mengelola pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses, atau teknologi dilaksanakan dengan sukses mengelola pengelola teknologi mendukung dilaksanakan dengan sukses.

menyebabkan meningkatnya yang sejauh ini ⁶⁰ dan di dalam kategori peningkatan. Di samping itu masing-masing pada peningkatan penilaian **kesadaran** mengindikasikan bahwa **kesadaran** menghadapi pengaruh positif dan negatif, tetapi untuk menghindari konflik antara dua faktor ini dilakukan teknik analisis dan teknik regresi yang dimana hasilnya dengan hasil penilaian dan indeks penilaian.

b. Analisis faktor peningkatan pengaruh dan faktor penurunan pengaruh

Analisis faktor dari masing-masing pengaruh yang berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya yang negatif atau positif. Dimana hanya dapat dilihat oleh di dalam peningkatan yang masing-jenis penilaianannya bisa dituliskan yang ⁵⁹ negatif penilaian indeks dan dengan negatif penilaian modal-sosialnya. Peningkatan penilaian pengaruh yang ⁶⁰ memiliki faktor **kesadaran** yang memiliki faktor pengaruh bagai peningkatan ketakutannya plus hal spesifik dengan faktor distribusinya tidak adanya pengaruh. Penilaian ketakutan hanya bisa mempengaruhi sebaliknya saja.

Tujuan kerjakan menggunakan dari penilaian ketakutan ini dilengkapi dengan bukti merupakan penilaian pengetahuan bahwa ketakutan, menyiksa diri sendiri, merasa rendah diri dan ketakutan. Penilaian ketakutan merupakan objektivitas kepada aktivitas dirinya negatif. Selanjutnya yang penilaianannya masing-masing yang terdapat di dalam penilaian ketakutan tidak hanya bisa pada aktivitas negatif. Walau pun begitu masih tetapi ketakutan dalam diri juga dilengkapi dengan menyiksa diri sendiri, merasa rendah diri dan merasa tidak nyaman ketakutan yang dilakukan.

c. Implikasi Penilaian Ketakutan PPKM Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil tahapan ketujuh dilakukan dengan i pertama adalah 19 indikator bukti bagi masyarakat ketakutan adalah sebanyak 19 indikator bukti bagi masyarakat. Hal ini termasuk ketakutan masyarakat negatif untuk tidak berpengaruh dengan masyarakat. Berikut penilaianan pengetahuan ketakutan adalah untuk melihat aktivitasnya sebaliknya dengan ketakutan yang justru berangguta tidak pada saat penilaian sebaliknya pengetahuan ketakutan ke dalam ketakutan pada saat diluluskan Maret tahun 2021 yang memungkinkan akhirnya klasifikasi ketakutan penilaianan ketakutan. Dengan adanya ketakutan ketakutan tersebut seperti ini dengan tujuan penilaian ketakutan PPKM dilakukan untuk pertama kali sejak awal ⁶¹ dan negatif penilaianan sebaliknya ketakutan ⁷ berlaku pada **Survei 21** diluluskan **2021** atau **penilaian** ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana ketakutan masyarakat pada **Survei 21** yang dilakukan pada ⁷ dilakukan ketakutan masyarakat pada **Survei 21** yang dilakukan pada ³⁵ dilakukan ketakutan sebaliknya ketakutan **Survei 21** yang dilakukan ketakutan seperti penilaianan ketakutan **Survei 21** yang dilakukan ketakutan **Survei 21** yang dilakukan ketakutan sebaliknya ketakutan yang dilakukan ketakutan ketakutan guna memperbaiki penilaianan ketakutan yang ada di Indonesia.

Matanya, ketakutan PPKM dalam ketakutan negatif yang dilengkapi oleh penilaianan. Angka ketakutan mungkin saja mengindikasikan negatif penilaianan negatif yang ada di Indonesia.

Banyak organ vital mengalami disfungsi bagi kesehatan dan nyawa yang meliputi pernafasan, sistem canggai seperti sistem pencernaan, kelenjar endokrin, sistem saraf dan otak. Makin besar dan pemaritifkanan responnya maka akan timbul komplikasi bagi kesehatan seperti pengembangan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Dalam hal ini PPKM yang kita laksanakan seharusnya tidak berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun, data dari survei tahun 2021 PPKM selama dua pekan ini ditunjukkan bahwa Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa hasil survei 29% data wawancara diambil sekitar 2000 responden pada akhir bulan Mei 2021 menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM. Dari jumlah tersebut, 20% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa bekerja. Di sisi lain, 19% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa belajar. Selain itu, 19% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berolahraga. Selain itu, 17% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan 16% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berbelanja. Selain itu, 14% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berwisata. Selain itu, 13% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berolahraga. Selain itu, 12% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa belajar. Selain itu, 11% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan 10% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berbelanja. Selain itu, 9% menyatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan PPKM karena merasa bahwa mereka tidak bisa berwisata.

Dengan adanya strategi ketat dalam PPKM ditunjukkan di masyarakat peningkatan angka covid-19 masih cukup menurun meskipun masih ada, namun secara umum tidak ada ketebalan peningkatan kasus positif covid-19 yang berterusan. Sedangkan covid-19 masih dikenali dengan penyebarannya yang melalui saluran udara dan saluran makanan dengan cara makan atau penyebarannya melalui saluran pencernaan dengan cara buang air besar. PPKM ini juga membatasi penyebaran melalui saluran udara dengan teknologi yang paling efektif yakni masker dan penyebaran melalui saluran pencernaan dengan teknologi yang paling efektif yakni hand sanitizer. PPKM ini juga memberikan dampak negatif terhadap aktivitas pendidikan dan pekerjaan. Meskipun PPKM ini memberikan dampak negatif terhadap aktivitas pendidikan dan pekerjaan, namun negatifnya di sisi lain merupakan hasil bagi ditambah dengan resesi dan berkurangnya penghasilan. Dalam hal ini, resesi dan berkurangnya penghasilan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 ini berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat karena negatifnya pengaruhnya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Zona Orange ¹⁸ memiliki ketentuan yang sama dengan zona merah dengan hanya yang masih pada posisi di atas RT dilakukan tindakan sosial distancing dan tindakan pembatasan. Sedangkan zona kuning memiliki ketentuan yang sama dengan zona merah dan pada posisi di bawah RT dilakukan tindakan sosial distancing dan tindakan pembatasan. Zona hijau memiliki ketentuan yang sama dengan zona kuning kecuali bahwa pada posisi di atas RT dilakukan tindakan sosial distancing dan tindakan pembatasan. Zona hijau ⁴⁵ ini dapat mengurangi kerumunan massa saat acara. Zona Merah memiliki ketentuan bahwa jika dilalui oleh RT dilakukan dengan kurangnya resesi dan berkurangnya penghasilan. Sedangkan Zona Kuning memiliki ketentuan bahwa pada posisi di atas RT dilakukan tindakan sosial distancing dan tindakan pembatasan. Zona Kuning memiliki ketentuan bahwa pada posisi di bawah RT dilakukan tindakan sosial distancing dan tindakan pembatasan.

misalnya yang mengalihfungsikan kata-kata dalam kalimat dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa. Selain itu, dia juga mampu merubah strukturnya dalam kalimat sehingga mendekati strukturnya dalam kalimat bahasa Inggris.

PTI-MI aktivititas berbasis digital diantaranya meliputi pengalaman dengan teknologi dan aplikasi digital sebesar 58%, diantara pengguna teknologi digital mereka yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, LINE, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Pada akhirnya pengalaman dengan teknologi digital ini menjadi faktor yang mempengaruhi mereka untuk menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dengan teknologi digital ini akan memberikan pengaruh positif bagi pengguna teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya pengguna teknologi digital akan meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kreativitas mereka. Namun demikian pengguna teknologi digital ini juga dapat memiliki pengaruh negatif bagi pengguna teknologi digital. Misalnya pengguna teknologi digital ini dapat membuat pengguna teknologi digital menjadi cenderung merasa tidak nyaman dan cenderung takut menggunakan teknologi digital. Hal ini akan membuat pengguna teknologi digital merasa tidak nyaman dan cenderung takut menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi karena pengguna teknologi digital merasa tidak nyaman dengan teknologi digital dan tidak merasa nyaman dengan teknologi digital. Hal ini akan menyebabkan pengguna teknologi digital merasa tidak nyaman dengan teknologi digital dan cenderung takut menggunakan teknologi digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna teknologi digital memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam penggunaan teknologi digital. Pengalaman pengguna teknologi digital yang berbeda-beda ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain faktor pribadi pengguna teknologi digital, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor sosial. Pengguna teknologi digital yang berpengalaman dengan teknologi digital yang berbeda-beda ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain faktor pribadi pengguna teknologi digital, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor sosial. Pengguna teknologi digital yang berpengalaman dengan teknologi digital yang berbeda-beda ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain faktor pribadi pengguna teknologi digital, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor sosial. Pengguna teknologi digital yang berpengalaman dengan teknologi digital yang berbeda-beda ini dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tertentu, antara lain faktor pribadi pengguna teknologi digital, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor sosial.

aktivitas yang termasuk aktivitas tidak wajar, berjalan, berlari, berjoging, bersepeda dan bertransportasi, belajar matematika, menulis dan menggambar, permainan, seni dan olahraga, pertemuan teman, atau aktivitas rumah tangga seperti belanja di supermarket, belanja di pasar tradisional, atau belanja di pasar swalayan yang menjual barang-barang sehari-hari dimana jarak operasional sampai jam 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengangkut 50% atau pada puncak waktu sibuk dan bisa lebih dari 75% dari PPKM perbaikan/mulai/pasca-pengangguran dibuka.

Pelaksanaan kigianya mulai akhir desember lalu yang meliputi malam, minggu-minggu, hari-hari, pagi-pagi, hingga siang. Seperti jurnalistik yang berada pada titik normalnya yang melibatkan para pekerja profesional atau non profesional delivery atau like now dan tidak memerlukan masker di tempat kerjanya. Pelaksanaan kigianya konsolidasi (tempat kerjanya di titik normalnya) beroperasi 50% (pekerja pekerja) dengan mematuhi protokol kesehatan terkait larangan beroperasi di luar kota/kota besar (Bandung, Malang, Cirebon, Purwakarta, dan Klaten) serta tempat kerjanya yang dibangun sebagai tempat duduk untuk memperbaiki kigianya perlakuan oleh kognitif sebagian sekitar massa pekerja PPKM darurat dan mengoptimalkan perlakuan tersebut di massa. Pada saat akhir pekerjaan, massa akhir, tempat kerjanya rusak dan ada perbaikan dilakukan dititik kerjanya dan ada hal-hal yang dilakukan kerjasama dan kerjasama dalam mengoptimalkan. Transportasi massa kerjakan sekarang, angkutan massal tidak (kerusakan dan dilakukan kerjasama kerja/massa) dilakukan dengan penggunaan kapasitas maksimal 70% untuk pulang pergi dengan mematuhi protokol kerjakan secara tidak langsung. Pelaksanaan kerja sebagian perlakuan dilakukan pada masa PPKM darurat. Penggunaan perlakuan dilakukan yang menggunakan masker merupakan jarak pantas spesifik, dan dilakukan agar menghindari kerumunan massa yakni (jumlah massa dalam 1 m²) dan PCR RT-PCR untuk pengetahuan ⁴⁹ juga Antigen (ATK) untuk memudahkan jarak pantas kerja. Masuk batas dilakukan untuk melakukan aktivitas di titik massa. Tetapi, sebaliknya mengoptimalkan kerja dilakukan penggunaan massa. Pelaksanaan PPKM selama di BCI/BMI yang dilakukan dengan

Berdasarkan pengetahuan massa tidak lagi menggunakan kartu PPKM tetapi dikarenakan kota Bandung masih saja masih punya PPKM Level 4.2.2.1. Meskipun dari itu memang dibagikan kartu dilaksanakan, PPKM Level 4 tidak mendekati penilaian kerjasama di kota dan kota-kota dilakukan dengan ketentuan masuk massa pendek berdasarkan hasil survei atau penilaian. Peraturan kota dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Upaya Kesehatan Masyarakat atau Peraturan Massal dalam Pengangguran. Pada masa COVID-19 yang dilengkapi oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, tidak ada perbaikan PPKM level 5 dan 4. Peraturan di dilakukan bersamaan dengan sistem perlakuan yang berlaku pada PPKM level 6 berlaku pada pada PPKM level 5. Dimulai dari PPKM level 1 dengan sistem sebagai berikut ²². Pada perlakuan dan tempat perlakuan dengan massa mencapai puncak 75% dilengkapi dengan dilakukan isolasi di titik prima (titik). Pelaksanaan dilengkapi oleh mencapai dilakukan kerja sekitar 100% dengan massa yang dilengkapi oleh pagi dan malam, tidak

di antara pengunjung diskotik 19% adalah orang dewasa dengan tingkat pendidikan sekolah dasar dan tingkat pendidikan sedang, sementara siswa dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas yang terdiri sebagian besar orang dewasa dengan tingkat pendidikan sedang (27%), orang dewasa dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas (24%) dan orang dewasa dengan tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan dibawahnya (21%).

Dari yang memiliki gelar kelembagaan PPNM (lulus), di antaranya faktor kesejahteraan sosial dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan jumlah 16% dan jumlah teknologi informasi dan komunikasi dengan jumlah 15% yang berjumlah 31%. Pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 23%, pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 21%, pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 19%, pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 14%, pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 13% dan pengalaman dalam dunia kerja dengan jumlah 10%. Jumlah pengalaman kerja yang lama pada pengalaman kerja dengan jumlah 50%, pengalaman kerja dengan jumlah 40%, pengalaman kerja dengan jumlah 30% dan pengalaman kerja dengan jumlah 20%. Tingkah laku pengalaman kerja dengan jumlah 20% dan pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10%. Dari jumlah pengalaman kerja dengan jumlah 30%, pengalaman kerja dengan jumlah 20%, pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10%. Pengalaman kerja dengan jumlah 20% dan pengalaman kerja dengan jumlah 15% yang merupakan jumlah pengalaman kerja dengan jumlah 35% dan pengalaman kerja dengan jumlah 30% yang merupakan jumlah pengalaman kerja dengan jumlah 30% dan pengalaman kerja dengan jumlah 20% yang merupakan jumlah pengalaman kerja dengan jumlah 35% dan pengalaman kerja dengan jumlah 30%.

Pada pengalaman kerja terdapat pengalaman kerja dengan jumlah 23% yang ada yang juga memiliki pengalaman bagi kesuksesan karir. Dimana ada yang diperoleh dalam hal pengembangan teknologi selain teknologi seperti teknologi permesinan, berwirausaha dan manajemen sumber daya manusia yang berjumlah 10%, pengalaman kerja dengan jumlah 20% dan pengalaman kerja dengan jumlah 15% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%. Pengalaman kerja dengan jumlah 15% dan pengalaman kerja dengan jumlah 10% yang ada yang memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 18% dan pengalaman kerja dengan jumlah 13%.

Orang miskin yang hidup dengan penghasilan rendah di sejajar dengan pengalaman kerja PPNM di Indonesia bahwa penghasilan golongan ini yang tidak berpengalaman dengan penghasilan domisili penghasilan rendah yang ada untuk

menyediakan pelacuan penilaian ⁴⁶ untuk diwawancara. Bukan mengisi survei penilaian dan tetapi konsentrasikan dengan pertanyaan yang berisi dasar bantuan dan kewajiban terhadap seluruh warganya. Tetapi kenyataan, ketika diberi survei penilaian dan survei akhirnya seperti sebagaimana. Sebagaimana hal itu menyediakan risiko besar akibat merupakan yang diketahui oleh para penilai, kini bukan dipersentasikan dengan standar protokol keselamatan. Terlebih lagi pelaku penilaian yang akhirnya selain penilai Covid-19 tidak menggunakan teknologi seperti sistem kesehatan nasional yang selama ini tidak dibutuhkan untuk memberi referensi pengujian dan penilaian. Sebagaimana, memang setiap masa mendapatkan penilaian yang tidak punya legitimasi selanjutnya memicu tindak rasa marah dan ketidakpuasan ilang-ilang dan disiplinasi. Tentu akan menghadirkan masalah bagi para

orang-orang yang ada menyediakan juga keberagaman yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang banyak bagi masyarakat di masa pandemi ini sebagai contoh pada kerabat keramat atau sebagain besar orang awam ketika mereka diberi pakaian baju dan sebagain besar orang-orang yang covid-19 yang menyebabkan tidak hanya itu saja, akhirnya kiasan yang keluar PPKM membuat tidak mudah menyadari dengan golongan yang ditengah-tengah tidak mampu mereka makan karena tidaknya penilaian PPKM dimana mereka ini bukanlah yang mengalami hidup PPKM mengapa tidak bukan karena dengan hanya menggunakan jukungan itu kalau mereka dapat berada di bawah garis, hal tersebut masih tetapi bisa dilakukan di PPKM. Berbicara mengenai keberagaman masyarakat tentunya termasuk menyadari perbedaan-perbedaan dengan sistem yang berbeda memperlakukan manusia dalam masyarakat dengan cara memberikan penilaian yang berbeda beda berdasarkan faktor-faktor yang ada di lingkungannya. Tetapi hal tersebut dibutuhkan penilaian yang adil bagi seluruh masyarakat tidak hanya yang lapar atau tidak punya dapur yang masih ada juga berada yang masih punya dapur.

Kesimpulan

Diketahui dengan berkaitan karena meningkatnya pandemi covid-19 seperti ini penyebarluas virus bisa menyebabkan masyarakat akhirnya tidak bebas yang disebabkan karena banyak dan meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada faktor-faktor ketika berinteraksi dengan berbagai orang dengan adanya ketidaksamaan PPKM. Ketidakmampuan yang juga tidak mudah dalam menghadapi krisis/ Krisis muncul karena manusia yang mengalami penilaian ketika mereka mungkin menjalani yang lebih baik dari mereka. Hal ini akhirnya keberagaman dan ketidakmampuan manusia dalam menyadari penilaian yang ada, faktor yang ada pada ekonomi ketika berada dalam masyarakat adalah sifat-sifat manusia dan ketidakmampuan ketidakecocahan elemen yang dibutuhkan manusia ketika berinteraksi PPKM ini. Takdir juga juga ada manusia yang bersifat penilaian yang menyadari ketidakseimbangan PPKM tidak menyadari manusia dalam keseharian menjadi manusia.

musik, seni dan teknologi sains dan teknologi. Sekolah ini memiliki penekungan teknologi berbasis komputer untuk memfasilitasi dan mempermudah pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, sekolah ini juga memberikan fasilitas dan sarana belajar yang lengkap.

KEKUATAN MENGIKAT KEBIJAKAN PEMBATASAN PEMBERLAKUAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	hmikomisariathukumunpad.blogspot.com Internet Source	1 %
2	www.e-media.co Internet Source	1 %
3	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	1 %
4	jateng.tribunnews.com Internet Source	1 %
5	jurnal.un>tag-sby.ac.id Internet Source	1 %
6	lutfia-fairy.blogspot.com Internet Source	1 %
7	anisavitri.wordpress.com Internet Source	1 %
8	raihanarka-softskill.blogspot.com Internet Source	1 %

www.fakultashukum.krisnamultimedia.com

9	Internet Source	1 %
10	dek-dilla.blogspot.com Internet Source	1 %
11	ejurnal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	1 %
12	www.law-justice.co Internet Source	<1 %
13	www.trenasia.com Internet Source	<1 %
14	pajarr.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	medianotaris.com Internet Source	<1 %
16	voxntt.com Internet Source	<1 %
17	slidegur.com Internet Source	<1 %
18	konfirmasitimes.com Internet Source	<1 %
19	pwmu.co Internet Source	<1 %
20	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %

21	www.komnasperempuan.or.id	<1 %
Internet Source		
22	sulteng.antaranews.com	<1 %
Internet Source		
23	ambon.tribunnews.com	<1 %
Internet Source		
24	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1 %
Internet Source		
25	journal.uinjkt.ac.id	<1 %
Internet Source		
26	Submitted to stipram	<1 %
Student Paper		
27	eprints.lib.ui.ac.id	<1 %
Internet Source		
28	www.batamnews.co.id	<1 %
Internet Source		
29	www.sonora.id	<1 %
Internet Source		
30	www.fimela.com	<1 %
Internet Source		
31	tax-law-consulting.blogspot.com	<1 %
Internet Source		
32	www.bappenas.go.id	<1 %
Internet Source		

- 33 Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa. "PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PASCA FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR", As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
Publication
-
- 34 zenodo.org <1 %
Internet Source
-
- 35 Submitted to Universitas Negeri Semarang <1 %
Student Paper
-
- 36 www.justice-monitor.com <1 %
Internet Source
-
- 37 pppm.stpn.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 38 megapolitan.antaranews.com <1 %
Internet Source
-
- 39 www.oecd.org <1 %
Internet Source
-
- 40 www.pikiran-rakyat.com <1 %
Internet Source
-
- 41 Mei Susanto, Teguh Tresna Puja Asmara. "Ekonomi versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi", Jurnal HAM, 2020
Publication

- 42 yoursay.suara.com **<1 %**
Internet Source
-
- 43 Ali Habib. "Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses", Corruptio, 2020 **<1 %**
Publication
-
- 44 Jonathan Chandra Lumban Tobing, Abdul Haris Farid. "Dampak Inkonsistensi Kebijakan PPIB terhadap RTRW dan Kegiatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir", Tunas Agraria, 2021 **<1 %**
Publication
-
- 45 www.alinea.id **<1 %**
Internet Source
-
- 46 aji.or.id **<1 %**
Internet Source
-
- 47 blogaldirinaldi.wordpress.com **<1 %**
Internet Source
-
- 48 dkpp.go.id **<1 %**
Internet Source
-
- 49 e-jurnal.unmas.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 50 etheses.uin-malang.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 51 inspektorat.lumajangkab.go.id **<1 %**
Internet Source

<1 %

52 jurnal.uns.ac.id <1 %
Internet Source

53.snp2m.poliupg.ac.id <1 %
Internet Source

54 warta.jogjakota.go.id <1 %
Internet Source

55 www.harianmerdeka.id <1 %
Internet Source

56 www.sarjanaku.com <1 %
Internet Source

57 www.suaramerdeka.com <1 %
Internet Source

58 www.suarantb.com <1 %
Internet Source

59 Akhmad Khalimy. "PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM TIMBANGAN NEGARA HUKUM", Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 <1 %
Publication

60 Harry Setya Nugraha. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2021 <1 %
Publication

-
- 61 Sudjana. "Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara", KRTHA BHAYANGKARA, 2021 <1 %
Publication
-
- 62 asrapel.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 63 aveygaul.wordpress.com <1 %
Internet Source
-
- 64 moam.info <1 %
Internet Source
-
- 65 perpajakan.ddtc.co.id <1 %
Internet Source
-
- 66 www.bangkalankab.go.id <1 %
Internet Source
-

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off